

Sosialisme Demokratis Dalam Kebhinekaan Indonesia

Muhammad Zaki¹, Daffa Rifqi Rafsanjani², Denis Andryan Hutabarat³,
Bima Hidayah Restu Putra⁴, Denny Oktavina Radianto⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Teknik Perpipaan, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya,
muhammadzaki@student.ppns.ac.id, daffariqirafsanjani@student.ppns.ac.id,
denisandryanhutabarat@student.ppns.ac.id, bimahidayah@student.ppns.ac.id
dennyokta@ppns.ac.id

ABSTRACT

The purpose of writing this journal is to find out how social democracy is implemented in the Indonesian framework. The main principles of social democracy, such as protection of human rights, social welfare, and economic justice, can become the basis for a social democratic view of life in Indonesia. This journal uses a qualitative descriptive approach using content analysis methods and literature studies. The content analysis method is a research method used to identify conclusions from a text. In contrast, literature studies in this research use types and secondary sources of information obtained from research results, posts and reference books that cover topics related to the theme of the journal. Solutions to social democratic problems that are still not fully implemented in Indonesia's diversity Even though Indonesia has adopted social democratic principles in its constitution, there are still many challenges in its implementation. One of the biggest challenges is the limitations in running a fair and equitable system for all levels of society.

Keywords: *social, Indonesia, democracy*

ABSTRAK

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sosial demokrasi dalam bingkai Indonesia. Prinsip-prinsip utama sosial demokrasi, seperti perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan ekonomi, dapat menjadi landasan bagi pandangan hidup sosial demokrat di Indonesia. Jurnal ini memakai tata cara pendekatan kualitatif deskriptif dengan memakai metode content analysis serta studi kepustakaan. Metode content analysis ialah tata cara riset yang digunakan buat mengenali simpulan dari suatu bacaan. Sebaliknya studi kepustakaan pada riset ini memakai tipe serta sumber informasi sekunder yang diperoleh dari hasil riset, postingan serta buku- buku rujukan yang mengulas topik yang berkaitan dengan tema jurnal. Solusi problematika sosial demokratis yang masih belum penerapan secara sempurna dalam kebhinekaan Indonesia Meskipun Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip sosial demokrasi dalam konstitusinya, namun masih terdapat banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan dalam menjalankan sistem yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: *sosial, Indonesia, demokrasi*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam perbedaan dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Perbedaan suku, adat, ras, agama, marga, dan lain lain menjadi hal yang lumrah dalam keseharian bernegara. Banyaknya masyarakat Indonesia menjadi sebuah persatuan sebagai keberagaman. Pemersatu bangsa Indonesia telah digambarkan oleh lambang Garuda yang mencengkram pita bertuliskan “ Bhineka Tunggal Ika ” yang memiliki arti berbeda beda tapi tetap satu jua⁶. Maksud tersirat dibalik itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tujuan yang sama menciptakan Indonesia yang adil dan sejahtera. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dalam kehidupan berbangsa apalagi di Indonesia yang sangat luas dan beragam daerah. Kehidupan bersosial masyarakat menjadi dasar bahwa manusia masih membutuhkan orang lain untuk mencukupi kehidupan yang satu dengan sesama.

Indonesia adalah negara demokrasi, makna demokrasi adalah kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Rakyat menjadi jawaban sebuah sistem pemerintahan Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem demokrasi Indonesia memberikan ruang bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Warga negara memiliki kebebasan berpendapat, mengemukakan aspirasi, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih para pemimpin mereka. Indonesia, sebagai negara dengan sistem sosial demokratis, mengusung prinsip-prinsip demokrasi dalam kerangka sosial yang adil. Sistem sosial demokratis di Indonesia bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan bagi seluruh rakyat, serta memastikan partisipasi aktif dan kesetaraan dalam masyarakat.

Sosialisme demokrasi adalah filosofi politik yang menganjurkan demokrasi yang dilaksanakan bersamaan dengan kepemilikan sosial langsung atas alat produksi, dengan penekanan pada manajemen mandiri dan manajemen demokrasi institusi ekonomi dalam suatu pasar atau suatu bentuk ekonomi sosialis terencana yang terdesentralisasi⁷. Prinsip-prinsip utama sosial demokrasi, seperti perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan ekonomi, dapat menjadi landasan bagi pandangan hidup sosial demokrat di Indonesia. Hal ini melibatkan dukungan terhadap sistem demokrasi yang inklusif dan partisipatif, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, peningkatan akses terhadap pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua warga negara, serta perluasan jaminan sosial untuk mengurangi kesenjangan sosial. Kebebasan yang bertabiat sosial serta demokratis jadi suatu yang konkret. Perihal tersebut, tidak sekesar mencakup proteksi terhadap intervensi negeri semata, misalnya intervensi semena- mena terhadap kekerasan hari nurani serta kebebasan berkomentar, namun pula

⁶ Tertulis dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengenai makna Bhineka Tunggal Ika

⁷ Kontributor dari proyek Wikipedia. (2023). Sosialisme demokratis. Wikipedia Bahasa Indonesia,

Ensiklopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisme_demokratis

seluruhnya berarti kebebasan dari kemiskinan serta ketakutan, selaku persyaratan material dalam menapaki kehidupan yang mandiri.⁸

Melihat Indonesia telah dapat berdiri sendiri menjadi negara yang merdeka dari penjajahan tapi Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka terhadap bangsanya sendiri. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan di Indonesia, sayangnya masih banyak rakyat yang belum menerima kesejahteraan dan keadilan yang layak. Ketimpangan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu penyebab utama ketidakmerataan tersebut. Sebagian besar pendapatan dan kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok, sementara sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kemiskinan dan kesulitan mencukupi kebutuhan dasar. Padahal sudah diterangkan dalam konstitusi Indonesia bahwa semua adalah milik negara dan untuk rakyat.⁹

Selain itu, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan yang berkualitas, perumahan yang layak, dan pelayanan kesehatan yang memadai masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesejahteraan yang setara dengan daerah-daerah yang lebih maju. Selain ketimpangan ekonomi, masih terdapat kesenjangan dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan akses keadilan. Beberapa kelompok masyarakat, seperti perempuan, anak-anak, minoritas etnis, dan orang-orang miskin, seringkali menjadi korban diskriminasi, kekerasan, dan penindasan. Sistem peradilan juga masih menghadapi tantangan dalam memberikan akses yang setara terhadap keadilan bagi seluruh warga negara.¹⁰

Penerapan prinsip sosial demokrasi memiliki peran penting dalam mengatasi perbedaan suku, agama, dan etnis yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini, sosial demokrasi berarti menghormati hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan beragama, dan keadilan sosial bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau etnis mereka. Pertama, sosial demokrasi mempromosikan inklusivitas dan pluralisme.¹¹ Prinsip-prinsip ini mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, agama, dan tradisi di Indonesia. Dalam sebuah masyarakat sosial demokratis, setiap individu dan kelompok memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan sosial, serta mendapatkan perlindungan yang setara. Kedua, sosial demokrasi berupaya menciptakan kesempatan yang adil dan merata bagi semua warga negara. Dalam konteks perbedaan suku, agama, dan etnis, hal ini berarti memastikan bahwa setiap

⁸ Friederich-Ebert-Stiftung. (2013). *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi* : Buku Bacaan Sosial Demokrasi | Daniel S. Lev. Daniel S. Lev.

⁹ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";

¹⁰ Bagong, Suyanto. *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010.

Hal 39

¹¹ Hasanuddin, L. (2004). *Masyarakat Indonesia: Demokrasi Sosial Indonesia*. Yappika. Hal 78

individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan kemajuan ekonomi. Dengan demikian, sosial demokrasi membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan bagi semua warga negara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ketiga, sosial demokrasi mempromosikan dialog antar suku, antar agama, dan antar etnis yang inklusif dan saling menghormati. Pemerintah dan masyarakat di Indonesia harus memastikan bahwa dialog tersebut terjadi secara terbuka, transparan, dan menghargai perspektif-perspektif yang berbeda. Melalui dialog sosial yang konstruktif, masyarakat dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan membangun pemahaman yang lebih baik antara berbagai kelompok.

Penerapan sosial demokrasi juga membutuhkan kebijakan publik yang mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan penegakan hukum yang adil bagi semua warga negara tanpa pandang bulu. Perlindungan terhadap hak-hak minoritas, upaya mengatasi diskriminasi, dan pembangunan yang berkelanjutan secara sosial menjadi bagian penting dari upaya mencapai kesetaraan yang sejati di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan paparan terkait hasil yang telah kami peroleh sosial demokrasi dalam bingkai kebhinekaan Indonesia. Masih banyak kekurangan dari berbagai aspek tetapi ini menjadi tugas kita bersama memberikan hasil hasil pemikiran cerdas kita guna membangun Indonesia yang maju dan siap memasuki peradaban Indonesia yang lebih baik lagi.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini memakai tata cara pendekatan kualitatif deskriptif ialah upaya menguasai bermacam konsep yang ditemui dalam proses riset, dengan memakai metode content analysis (analisis isi) serta studi kepustakaan (library research). Metode content analysis ialah tata cara riset yang digunakan buat mengenali simpulan dari suatu bacaan. Sebaliknya studi kepustakaan (library research) pada riset ini memakai tipe serta sumber informasi sekunder yang diperoleh dari hasil riset, postingan serta buku- buku rujukan yang mengulas topik yang berkaitan dengan tema jurnal.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Solusi problematika sosial demokratis yang masih belum penerapan secara sempurna dalam kebhinekaan Indonesia kami akan memberikan paparan terkait isu ini.

Pertama, tentang keadilan yang ada di Indonesia, keadilan dalam bernegara dan berbangsa di Indonesia merupakan prinsip yang penting untuk memastikan terciptanya masyarakat yang adil dan merata. Prinsip keadilan ini tercermin dalam

¹² Direktorat Jenderal Keuangan Negara (2020). Memahami Metode Penelitian Kualitatif.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html#:~:text=Dalam%20hal%20pengumpulan%20data%2C%20Gill>

berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum, pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks hukum, keadilan diwujudkan melalui penerapan hukum yang adil dan setara bagi seluruh warga negara. Setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan tanpa diskriminasi. Sistem peradilan yang independen dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum.¹³

Selain itu, keadilan juga tercermin dalam sistem pemerintahan. Pemerintah harus bertindak secara adil dalam menyediakan layanan publik dan memastikan kesejahteraan rakyat. Prinsip keadilan ini berarti bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat dari pembangunan negara. Aspek ekonomi juga penting dalam menciptakan keadilan. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang adil untuk memastikan kesempatan ekonomi yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan ekonomi, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja adalah langkah-langkah penting dalam mencapai keadilan ekonomi. Keadilan sosial juga merupakan aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial berarti setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap fasilitas publik, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan yang adil untuk berkembang. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, keadilan sosial juga mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan agama, serta penanganan terhadap isu-isu sosial yang melibatkan ketimpangan dan marginalisasi.

Secara keseluruhan, keadilan dalam bernegara dan berbangsa di Indonesia merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi. Implementasi keadilan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Dengan mengedepankan keadilan, diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup dalam harmoni, kesetaraan, dan kemakmuran yang berkelanjutan¹⁴. Tetapi pada kenyataannya keadilan di Indonesia belum diterapkan secara seadil adilnya masih banyak kasus yang masih tebang pilih terkait keadilan. Seperti contoh kasus nenek Asyani yang dituduh mencuri kayu milik Perhutani Dia didakwa dengan Pasal 12 huruf d juncto Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Pada sidang final hakim memberikan vonis satu tahun penjara dan denda 500 juta subsider kurungan satu hari. Apabila membahas keadilan mari saya beri contoh yang mendapati kerugian lebih besar lagi pada kasus empat pegawai bea cukai yang korupsi uang ekspor tekstil senilai 1,6 Triliun rupiah yang secara gamblang merugikan negara trilyunan rupiah, namun apa yang diberi hukuman oleh hakim hanya 2 tahun penjara. Apakah ini sudah bisa termasuk disebut keadilan ada di Indonesia? Tentu tidak masih banyak pelanggaran pelanggaran keadilan yang harus

¹³ Pasal 28D (1) UUD NKRI Tahun 1945 menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

¹⁴ Sukirman Nurdjan and Mirnawati (2019). *TABIR KEADILAN*. Penerbit Aksara TIMUR.

diusut tuntas oleh para penegak hukum tanpa pandang bulu dari kalangan mana mereka berasal. Apabila mereka melanggar maka hukum tetap tegak tanpa pandang bulu¹⁵. Saya sepenuhnya setuju bahwa keadilan hukum harus ditegakkan tanpa melihat latar belakang seseorang. Prinsip dasar dari sistem peradilan yang adil adalah bahwa setiap individu harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, dan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan tanpa prasangka.

Keadilan hukum yang merata dan tanpa diskriminasi adalah prinsip yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan setara. Setiap orang, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, ras, agama, atau jenis kelamin, harus diperlakukan sama di mata hukum. Tidak boleh ada perlakuan khusus atau perlakuan diskriminatif terhadap siapa pun. Penerapan keadilan hukum yang adil juga memerlukan sistem peradilan yang independen dan transparan. Hakim dan pejabat hukum harus menjalankan tugas mereka dengan integritas dan objektivitas, tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak-pihak lain. Proses hukum harus terbuka dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak-hak mereka. Penting juga untuk memastikan akses yang setara terhadap sistem peradilan bagi semua orang. Ini berarti bahwa orang-orang dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi harus memiliki akses yang sama terhadap layanan hukum, konsultasi hukum, dan perwakilan hukum yang berkualitas. Tidak boleh ada hambatan atau diskriminasi dalam mengakses keadilan.

Untuk mencapai keadilan hukum yang merata, adalah penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus memperkuat sistem peradilan, melaksanakan reformasi hukum yang diperlukan, memberikan pelatihan yang memadai kepada para profesional hukum, dan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan dihormati. Dalam masyarakat yang adil, setiap orang harus merasa aman bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama dalam sistem hukum, tanpa memandang latar belakang mereka.

Kedua, Kemiskinan adalah masalah serius yang masih dihadapi oleh sebagian penduduk Indonesia. Meskipun ada kemajuan dalam pengurangan tingkat kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Indonesia adalah kesenjangan ekonomi yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan yang sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja yang layak. Selain itu, sektor informal dan pekerjaan

¹⁵ H. (2022). *Jangan Pernah Mencari Keadilan Dalam Buku, Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu*. Sinar

Indonesia Baru - Hariansib.com. ,

<https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Jangan-Pernah-Mencari-Keadilan-dalam-Buku--Tegakkan-Hukum-Tanpa-Pandang-Bulu>

dengan upah rendah juga masih menjadi kenyataan bagi banyak orang miskin di Indonesia.

Masalah lain yang berdampak pada kemiskinan adalah kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Pendidikan yang terbatas dapat menjadi penghalang bagi mereka yang ingin meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas memberikan peluang yang lebih baik untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, faktor-faktor seperti krisis ekonomi, bencana alam, konflik sosial, dan kurangnya infrastruktur yang memadai juga dapat berdampak negatif pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan, termasuk program-program pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, dan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi mereka yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh di Indonesia. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara untuk mencapai kesejahteraan yang layak. Hal ini tercermin dari tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2022 yang kembali menurun menjadi 9,54%, dari semula 9,71% di Bulan September 2021 (Maret 2021: 10,14%). Tingkat kemiskinan terus dalam tren menurun di tengah tekanan harga komoditas global, khususnya harga pangan dan energi yang berdampak pada harga-harga domestik dan daya beli masyarakat. Secara spasial, tingkat kemiskinan di perkotaan menurun menjadi sebesar 7,50% (September 2021: 7,60%; Maret 2021: 7,89%). Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan Rasio Gini sedikit meningkat, dari semula 0,381 pada posisi September 2021 menjadi sebesar 0,384 pada Maret 2022. Kenaikan Rasio Gini didorong oleh meningkatnya ketimpangan di perkotaan per Maret 2022 menjadi 0,403 dari 0,398 pada September 2021. Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah untuk mempertahankan harga jual energi domestik menjadi sangat krusial untuk mencegah naiknya angka kemiskinan penduduk.¹⁶ Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan di negara ini. Berbagai kebijakan dan program telah dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia:

1. Program Keluarga Harapan (PKH): PKH adalah program bantuan sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada keluarga miskin dan

¹⁶ Badan Kebijakan Fiskal - Tingkat Kemiskinan Maret 2022 Menurun di Tengah Risiko, APBN akan Terus Menjadi Shock Absorber.
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/408>

rentan. Program ini memberikan tunjangan kepada keluarga penerima yang bersyarat, seperti anak-anak yang bersekolah dan anggota keluarga yang mendapatkan layanan kesehatan.

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT): Pemerintah juga melaksanakan program BLT sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19. Program ini memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi.
3. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PKT): PKT merupakan program yang melibatkan berbagai sektor pemerintahan untuk mengatasi kemiskinan secara holistik. Program ini mencakup berbagai komponen, seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
4. Pengembangan infrastruktur: Pemerintah Indonesia juga melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat di daerah terpencil dan miskin.
5. Peningkatan akses ke layanan dasar: Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Ini melibatkan pembangunan sekolah, pusat kesehatan, penyediaan air bersih, dan sanitasi yang layak.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga berpartisipasi dalam kerjasama internasional, seperti program-program Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan rakyat Indonesia juga menjadi tanggung jawab penuh pemerintah dan pejabat pejabat negara.¹⁷

Ketiga, Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau latar belakang sosial dan ekonomi. Hak asasi manusia meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak kolektif. Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip-prinsip universal seperti martabat, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Hak-hak sipil dan politik mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang, hak atas keadilan dan perlindungan hukum, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemilihan. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, akses ke layanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas, perumahan yang layak, serta hak atas makanan, air bersih, dan sanitasi. Hak-hak kolektif meliputi hak untuk berkumpul dan berserikat, hak atas identitas budaya, dan hak-hak kelompok minoritas dan pribumi.

¹⁷ Pasal 34 UUD 1945 ayat 3 berbunyi “Negara bertanggung-jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia melalui kebijakan, hukum, dan tindakan yang tepat. Organisasi dan lembaga internasional juga berperan penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di tingkat global.¹⁸ Berikut adalah gambaran umum mengenai hak asasi manusia di Indonesia:

1. Kebebasan Berbicara: Indonesia memiliki kebebasan pers dan kebebasan berbicara yang relatif kuat, dengan beragam media massa dan platform daring yang aktif. Namun, terdapat beberapa pembatasan terhadap kebebasan berbicara, termasuk kasus-kasus pelanggaran terhadap jurnalis dan aktivis yang mengekspresikan pendapat kritis terhadap pemerintah.
2. Hak-hak Perempuan dan Anak: Indonesia telah mengadopsi berbagai undang-undang dan kebijakan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Namun, masih ada tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum terkait kekerasan gender, pekerja anak, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
3. Hak-hak Minoritas dan Agama: Indonesia adalah negara dengan beragam kelompok etnis, agama, dan budaya. Meskipun konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, beberapa kasus intoleransi dan kekerasan terhadap minoritas agama masih terjadi. Perlindungan hak-hak minoritas dan agama perlu ditingkatkan untuk memastikan kehidupan yang adil dan damai bagi semua warga negara.
4. Hak Asasi Manusia di Papua: Konflik dan situasi hak asasi manusia di Provinsi Papua, khususnya Papua Barat, telah menjadi perhatian internasional. Terdapat laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berbicara, dan penindasan terhadap aktivis dan masyarakat adat di wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan dan mengatasi masalah di Papua, tetapi tantangan terus ada.
5. Hukuman Mati: Indonesia masih menerapkan hukuman mati sebagai bentuk hukuman dalam sistem peradilan pidana. Meskipun penggunaan hukuman mati telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, hal ini masih menjadi perhatian bagi para pemantau hak asasi manusia dan organisasi internasional yang menentang hukuman mati.

Dalam kerangka sosial demokrasi, hak asasi manusia dianggap sebagai fondasi yang tidak dapat dikompromikan dari sistem politik dan sosial yang berkeadilan. Pendekatan ini memperkuat perlindungan dan penghormatan terhadap

¹⁸ Republik Indonesia, M. (2023). *Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA* |

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2#:~:text=%E2%80%9CSetidaknya%20terdapat%20dua%20undang%20undang,tentang%20Pengadilan%20Hak%20Asasi%20Manusia.>

hak asasi manusia melalui kebijakan publik, program sosial, dan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, memberikan perlindungan sosial yang lebih luas, meningkatkan akses ke layanan dasar, dan mempromosikan partisipasi politik.

Keempat, Kesetaraan adalah prinsip fundamental yang melibatkan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu, tanpa memandang perbedaan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau latar belakang sosial dan ekonomi mereka. Prinsip kesetaraan berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, di mana semua individu memiliki hak yang sama untuk kesempatan, akses, perlindungan, dan kesejahteraan. Kesetaraan sosial adalah tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama (Haryanta, 2019). Kesetaraan juga telah diatur dalam konstitusi Indonesia¹⁹. Namun kesetaraan di Indonesia masih kurang penerapannya karena masih ada orang-orang yang menganggap paling sering perempuan dianggap kurang andil dalam masalah pekerjaan. Pada nyatanya laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas yang sama dan berhak mendapatkan haknya untuk melaksanakan kegiatan pada kesehariannya tanpa terhalang oleh gender. Pelanggaran terhadap kesetaraan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk diskriminasi di tempat kerja, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan atau pelayanan kesehatan, stereotipe yang merendahkan, pelecehan seksual, dan masih banyak lagi. Ini adalah isu yang perlu diperhatikan secara serius dan harus diberantas. Contoh kasus Aice tahun 2020 dimana buruh perempuan mendapatkan beban pekerjaan yang berat tidak sesuai porsinya. Korban bernama Elitha yang memiliki penyakit endometriosis²⁰ sejak lama. Elitha sudah bekerja di perusahaan Aice telah bertahun-tahun dengan berat hati Elitha tetap menjalankan pekerjaannya karena diancam PHK. Elitha sempat menyampaikan bahwa dia ingin mengajukan diri untuk pindah divisi tetapi ditolak mentah-mentah. Pada akhirnya waktu menjalankan pekerjaannya mengalami pendarahan akibat kerja beratnya. Kenyataannya tidak hanya Elitha yang menjadi korban dari perusahaan ini tetapi masih banyak buruh lainnya yang terabaikan. Tapi perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak buruh perempuan tampaknya masih jauh karena masih banyak perusahaan yang menelantarkan hak-hak buruh-buruh perempuan mereka demi mengejar efisiensi dan efektivitas produksi perusahaan. Para pengamat buruh dan gender berargumen praktik penindasan hak buruh perempuan merupakan akibat dari pelanggengan budaya patriarki di sektor ketenagakerjaan di Indonesia.²¹ Dari

¹⁹ UUD 1945 pasal 27 ayat 1 berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

²⁰ *Endometriosis* adalah gangguan kesehatan yang terjadi karena adanya pertumbuhan jaringan tidak normal dari endometrium pada bagian luar dinding rahim. Pertumbuhan jaringan endometrium yang tidak normal ini dapat terjadi pada ovarium, vagina, saluran kemih, hingga usus.

²¹ Yasmin, A. A., Krismantari, I., & Tamara, N. (2020). Kasus Aice: dilema buruh perempuan di

contoh kasus ini kita bis menilai bahwa masih banyak kurangnya penegakan mengenai kesetaraan yang ada di Indonesia. Melanggar kesetaraan sangat bertentangan praktik sosial demokratis yang menjadi acuan bangsa Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Meskipun Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip sosial demokrasi dalam konstitusinya, namun masih terdapat banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan dalam menjalankan sistem yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia, masih terdapat beberapa isu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip sosial demokrasi, seperti kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar antara kota dan daerah terpencil, serta akses terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan untuk sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan upaya lebih lanjut dalam memperjuangkan penerapan sosial demokrasi secara konsisten. Perlu ada reformasi yang bertujuan untuk mengatasi ketidakmerataan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, sehingga dapat mencapai keadilan sosial yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Billah, M. M. (2000). *Membalik Kuasa Negara Ke Kendali rakyat*. Pusat Studi Pengembangan Kawasan.
- Demokrasi Sosial. Wikiwand. (2020). https://www.wikiwand.com/id/Demokrasi_sosial
- Felany, A. D. (2021). *Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Dan Jaminan Sosial Negara Demokrasi*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7u5sq>
- Friedrich-Ebert-Stiftung, B. (n.d.). *Jurnal Sosial Demokrasi*. Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07003/index.html>
- Hasanuddin, L. (2004). *Masyarakat Indonesia: Demokrasi Sosial Indonesia*. Yappika.
- Hikam, M. A. (2018). *Demokrasi Indonesia: Antara Asa Dan Realita*. Afkar Pustaka.
- Jurnal SOSDEM 7th Edition - library.fes.de. (n.d.). <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07003/2009-07.pdf>
- Magenda, B., & Siregar, A. (2007). *Demokrasi & Keadilan sosial*. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau bekerjasama dengan UNRI Press.
- Petring, A. (2013). *Negara kesejahteraan Dan Sosial demokrasi*. Friedrich-Ebert-Stiftung, Kantor Perwakilan Indonesia.
- Ranjabar, J. (2013). *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Penerbit Alfabeta.

Indonesia dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja.
<https://theconversation.com/kasus-aice-dilema-buruh-perempuan-di-indonesia-dan-pentingnya-kesetaraan-gender-di-lingkungan-kerja-133010>

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 3 No 3 (2023) 558 - 569 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v3i3.4179

Sopiana, M. (2021). *Keadilan Sosial Sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila.*

<https://doi.org/10.31219/osf.io/yhrpt>